

EMPAT LANGKAH STRATEGIS MEMBANGUN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN DI INDONESIA

Agus Murnomo
Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Unnes
email: amurnomo@yahoo.com

Abstract

The term technical and vocational education is introduced in the Law No. 20 of 2003 on National Education System. The concept of technical and vocational education emphasizes on education which ensures that students have a specific expertise and job. The government hopes that graduates of a technical and vocational education become work forces who have life skills which are relevant to the job market demand. In order to realize the expectation quality improvement on technical and vocational education is needed. Some issues which have to be taken into account regarding the quality improvement of technical and vocational education are that: (1) the administration must be supported by the administrating organization, local and central government, (2) the curriculum is competence-based, (3) the administration is developed in line with the local potentials, (4) and the administration must involve business/industry. The success of the administration of technical and vocational education will lessen the state's economical burden. On the contrary, if it fails, it will increase the number of unemployment which will worsen the state's economy.

Kata kunci: kualitas pendidikan, pendidikan vokasi, kejuruan

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sebagian besar masih awam dengan istilah pendidikan vokasi, dan itu hal yang wajar karena kata vokasi belum banyak dikenal secara luas dalam peristilahan yang ada di masyarakat, bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata vokasi juga tidak ditemukan. Dewasa ini, kata vokasi sering dikaitkan dengan kata pendidikan, sehingga muncul istilah pendidikan vokasi.

Di dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, istilah pendidikan vokasi belum dikenal, dan istilah tersebut baru dikenal di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut dituliskan, pendidikan vokasi

merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana (penjelasan pasal 15). Jadi inti dari pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja dengan keahlian terapan tertentu.

Pendidikan vokasi khususnya jenjang pendidikan tingkat menengah disebut dengan Pendidikan Kejuruan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mendefinisikan Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Lebih khusus lagi dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk suatu jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian, konsep pendidikan vokasi dan kejuruan menekankan pada pendidikan yang mengantarkan peserta didik untuk memiliki suatu keahlian tertentu agar mendapatkan jenis pekerjaan tertentu pula. Diharapkan dengan pendidikan vokasi dan kejuruan ini, tenaga kerja Indonesia mempunyai kecakapan hidup (*life skill*) yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja (*demand driven*). Untuk mendorong ke arah itu diperlukan peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia.

PENDIDIKAN VOKASI DAN KEJURUAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya agar mempunyai daya saing dalam menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai tuntutan permintaan pasar kerja. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, di dalam Pasal 15 undang-undang tersebut menetapkan jenis pen-

didikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Merujuk kepada peraturan perundangan yang ada, pendidikan vokasi yang dilaksanakan di tingkat pendidikan menengah disebut Sekolah Menengah Kujuruan (SMK) dan yang dilaksanakan ditingkat pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Universitas atau Institut. Untuk memperjelas posisi pendidikan vokasi dalam tataran dunia pendidikan di Indonesia, di dalam UU RI NO. 20/2003; Peraturan Pemerintah (PP) NO.19/2005 dan Draf PP tentang pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi disebutkan bahwa:

1. Bentuk penyelenggaraan pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 (Pasal 23 Ayat [2]).
2. Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja (Pasal 22 Ayat [3]).
3. Kurikulum pendidikan vokasi merupakan rencana dan pengaturan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi, standar materi, indikator pencapaian, strategi pengajaran, cara penilaian, dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi pendidikan vokasi (Pasal 27 Ayat [3]).
4. Pendanaan pendidikan vokasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia kerja (dunia usaha/industri), dan masyarakat (Pasal 38 Ayat [1]).
5. Peran serta masyarakat di dalam pendidikan vokasi meliputi peranserta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan

organisasi kemasyarakatan (Pasal 39 Ayat [1]).

6. Pelaksanaan kegiatan pendidikan vokasi dapat menjamin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 40 Ayat [1]).

Pendidikan vokasi yang diselenggarakan pada tingkat pendidikan menengah dengan nama SMK, di dalam SK Mendikbud No. 049074U1990, mempunyai tujuan:

1. mempersiapkan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
2. meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitarnya;
3. meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; dan
4. menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Pengembangan SMK oleh pemerintah terus digulirkan melalui Depdiknas dengan menetapkan tiga sasaran. Seiring dengan target tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit-PSMK) yang berada di bawah gugus tugas Dirjen Manajemen Dikdasmen menetapkan tiga sasaran utama dalam mewujudkan SMK yang mampu menjawab tuntutan era persaingan pasar bebas. Sasaran utama yang dimaksud sebagai berikut.

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, melalui sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan daya tampung SMK melalui pengembangan SMK baru, pembentukan SMK kecil di SMP

atau institusi lain, SMK kelas jauh di Pondok Pesantren serta di industri dan SMA, serta pemberdayaan SMK besar dan swasta.

- b. Membuka layanan khusus untuk SMK di daerah tertinggal atau daerah perbatasan.
 - c. Memberikan beasiswa miskin serta perbaikan infrastruktur.
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing meliputi sebagai berikut.
 - a. Menyediakan sarana pendukung, perpustakaan, laboratorium atau bengkel.
 - b. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha/industri.
 - c. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengembangan *ICT Center*, lab komputer dan akses internet.
 - d. Memperbanyak buku teks, buku referensi dan buku bacaan.
 - e. Meningkatkan perolehan rata-rata skor ujian nasional, termasuk penguatan dasar, meningkatkan jumlah frekuensi ujian hingga penyelenggaraan ujian *online*.
 - f. Mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi, termasuk juga pelaksanaan sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan internasional.
3. Penguasaan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik meliputi sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan *capacity building* di semua tingkatan level organisasi, mulai Dit-PSMK, manajemen sekolah hingga *stake holder* SMK.
 - b. Mensosialisasikan kebijakan dan program Dit-PSMK ke semua pihak baik masyarakat, industri maupun lembaga internasional.
 - c. Membuat *school mapping* beserta

analisis kebutuhan dunia kerja.

- d. Meningkatkan sistem manajemen mutu, monitoring dan evaluasi penerapan.

Sejalan dengan program Dit-PSMK tersebut, secara konseptual peran pendidikan kejuruan sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan mempunyai kelebihan berupa peluang siswa mendalami disiplin ilmu tertentu, sehingga mereka memiliki dua opsi. *Pertama*, dapat langsung memasuki lapangan kerja setelah lulus dan *kedua*, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Abuzar 2009).

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIDAN KEJURUAN

Keterkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan, terdapat beberapa hal yang perlu digaris-bawahi sebagai berikut.

1. Pendidikan vokasi dan kejuruan harus ada dukungan dari institusi penyelenggara dan pemerintah daerah.

Institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan vokasi dan kejuruan perlu mempersiapkan sarana prasarana pendidikan termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pengajarnya. Dosen dan guru diberi kesempatan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang selaras dengan keilmuannya, misal diikutkan magang di industri, seminar dan lokakarya, serta diikutkan kursus keterampilan, sehingga mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ini dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan

kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya (Hendra 2009). Sedangkan dukungan pemerintah atau pemerintah daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengajak masyarakat berpartisipasi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini penting dalam upaya mempercepat tercapainya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.

2. Kurikulum yang disusun berbasis kompetensi.

Pendidikan di Indonesia setidaknya sudah tujuh kali mengalami perubahan atau penyempurnaan kurikulum, yang diawali tahun 1960, 1968, 1974, 1984, 1994, 2004, dan sekarang 2006. Untuk kurikulum 2006 lebih lazim disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara substansial, penamaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Namun esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap bercirikan tercapainya kompetensi dan bukan tuntas tidaknya *subject matter* yaitu:

- a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
- b. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- c. Penyampaian dalam pembelajaran

- menggunakan pendekatan-pendekatan metode yang bervariasi.
- d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memiliki unsur edukatif.
 - e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Dibanding kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya (versi 2002 dan 2004), kurikulum 2006 mempunyai perbedaan mendasar, yaitu sekolah atau satuan pendidikan diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan sampai pada pengembangan silabusnya (Wawan 2009). Kurikulum berbasis kompetensi menuntut dosen dan guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan (Budi 2009).

Bila kembali kepada definisi pendidikan vokasi dan kejuruan sebagai suatu jenis pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, salah satu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah di dalam menyusun kurikulum dibuat untuk kegiatan belajar-mengajar lebih didominasi kegiatan praktik, baik praktikum yang dilakukan di laboratorium, bengkel, kebun percobaan, maupun ruang studio. Secara umum perbandingan kegiatan praktik dengan teori adalah 70% berbanding 30%, meskipun dalam beberapa kasus angka

perbandingan itu dapat menjadi 60% berbanding 40%.

3. Pendidikan vokasi dan kejuruan dikembangkan sesuai potensi daerah.

Kenyataan yang dapat diamati sementara ini ribuan pencari kerja memadati bursa-bursa kerja. Ini menunjukkan tidak tersambunginya dunia pendidikan dengan dunia kerja. Para pemburu kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan berebut lowongan kerja yang jumlahnya terbatas. Di sisi lain calon tenaga kerja itu tidak memiliki kualifikasi khusus sehingga lowongan apapun diserbu. Fenomena seperti ini merupakan keluaran (*output*) dunia pendidikan tidak dapat memenuhi kualifikasi dunia kerja. Dari kenyataan ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antar-industri dan para pencari kerja. Untuk itu, sebaiknya setiap kabupaten/kota atau provinsi diproyeksikan harus memiliki sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga sejalan dengan penerapan otonomi daerah, bahwa satuan pendidikan khususnya perguruan tinggi perlu bekerjasama dengan industri dan pemerintah daerah. Terjalannya kolaborasi kaki tiga (*tripartit*) antara pendidikan vokasi dan kejuruan, pemerintah daerah dan dunia industri diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan terbentuknya kolaborasi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kesinambungan dunia pendidikan dan dunia industri yang lebih baik (Joko 2004).

4. Pendidikan vokasi dan kejuruan harus melibatkan dunia industri.

Kolaborasi institusi atau lembaga pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasi dan kejuruan. Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah serta organisasi profesi harus membantu standar-standar keahlian yang dibutuhkan dunia industri. Keterlibatan dunia industri dalam pendidikan vokasi dan kejuruan terutama adalah dalam memberikan masukan terhadap kompetensi dan standarisasi kemampuan peserta didik lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan. Keharmonisan antara institusi penyelenggara pendidikan vokasi dan kejuruan dengan dunia industri seyogianya dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk menetapkan suatu sertifikasi profesi lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan yang diakui bersama. Dengan demikian, tuntutan agar pendidikan vokasi dan kejuruan dapat memenuhi harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang siap pakai dapat terwujud. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu digiatkan kembali program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang sudah merupakan kebijakan publik dalam bentuk pendidikan keahlian profesional yang diwujudkan dengan memadukan secara sistematis dan senantiasa sinkron antara program pendidikan vokasi dan kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada industri. Dalam program ini diharapkan pemerintah pusat atau daerah dapat memberi apresiasi kepada dunia industri. Terkait temuan hasil penelitian Suparlan (2008), yang

bersangkutan menyarankan sebagai berikut.

- a. Kuantitas dan kualitas komunikasi antara instansi penyelenggara pendidikan vokasi dan kejuruan dengan dunia usaha/industri dalam rangka penyusunan program pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) perlu ditingkatkan.
- b. Di dalam memilih dunia usaha/industri perlu dipertimbangkan pemanfaatan dari sisi pembelajaran bagi peserta didik.
- c. Diperlukan peraturan daerah atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang mengatur tentang pedoman kerjasama institusi penyelenggara pendidikan vokasi dan kejuruan dengan dunia usaha/industri serta instansi terkait.
- d. Ada peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PSG yang bersifat menyeluruh dan terpadu oleh instansi terkait.

MENATAP PERAN PENDIDIKAN VOKASIDAN KEJURUAN

Pendidikan vokasi dan kejuruan memiliki peranan yang sangat besar yang selanjutnya dipilih dengan lima butir argumentasi (Hendra 2009).

1. Menghadapai globalisasi perdagangan

Globalisasi yang merupakan pembentuk kehidupan politik dan ekonomi, tengah memasuki fase yang lebih kompleks. Kini, globalisasi tidak lagi konsep yang diekspor negara maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Sebaliknya, negara yang sedang berkembang, tidak sekadar menangkap konsep globalisasi namun membuat paket ekonomi sendiri dan perharinya mengirim versi baru ke negara maju. Saat ini globalisasi lebih

berupa proses dua arah saat ekonomi negara berkembang tidak lagi menjadi penerima pasif dari para pelaku aktif. Jadi sekarang medan ekonomi global sedang berubah. Manusia sebagai sumber dari segala sumber yang berdaya tetap, merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan pasar bebas. Persoalan yang dihadapi, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini masih tergolong rendah, oleh karena itu keberadaan pendidikan vokasi dan kejuruan merupakan alternatif dan tepat dilaksanakan untuk menjawab tantangan global menghadapi *free trade marketing*.

2. *Skill intensive*

Negara Indonesia, Malaysia, Iran dan Thailand, menurut hasil studi *ASEAN Productivity Organization* adalah negara yang memiliki fokus adaptasi teknologi impor dengan beberapa perbaikan. Karakteristik dari negara-negara tersebut dengan beberapa perbaikan adalah *skill intensive* (Putu 2009). Sesuai dengan karakteristik Negara Indonesia pada *skill intensive*, penyelenggaraan penguatan pendidikan vokasi khususnya pendidikan kejuruan dan pelatihan-pelatihan singkat pasca SMP adalah lebih tepat dibanding memperluas pendidikan SMA.

3. Pentingnya tenaga kerja terampil

Keunggulan industri suatu negara ditentukan oleh kualitas tenaga kerja terampil yang terlibat langsung dalam proses produksi yang berada di garis depan. Oleh karena itu, alasan pentingnya tenaga kerja terampil adalah sebagai berikut.

a. Tenaga kerja terampil berperan di dalam menentukan kualitas dan biaya produksi.

- b. Tenaga kerja terampil sangat diperlukan di dalam mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara.
- c. Tenaga kerja terampil merupakan faktor unggulan di dalam menghadapi persaingan global.
- d. Penerapan teknologi akan menjadi faktor unggulan tergantung tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu mengaplikasikannya.
- e. Seseorang yang memiliki keterampilan berpeluang besar untuk memperoleh pekerjaan dan produktif
- f. Semakin banyak warga suatu negara yang memiliki keterampilan dan produktif, semakin kuat kemampuan ekonomi negara itu.

Pendidikan vokasi dan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan lulusan siap kerja melalui bekal keterampilan.

4. Pendidikan vokasi dan kejuruan memiliki multi fungsi

Pendidikan vokasi dan kejuruan kalau dikelola dengan baik dapat memberi kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pendidikan vokasi dan kejuruan tidak sekedar mendidik dan melatih keterampilan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan bagi masyarakat. Karena itu, pendidikan vokasi dan kejuruan tidak hanya adaptif tetapi juga harus antisipatif. Fungsi pendidikan vokasi dan kejuruan adalah sebagai berikut.

- a. Bagi peserta didik: meningkatkan kualitas diri, meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan dan berwiraswasta, menyiapkan bekal pendidikan lebih lanjut, penyiapan

diri bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan.

- b. Bagi dunia kerja: peluang memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha.
 - c. Bagi masyarakat: dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara dan mengurangi pengangguran.
5. Pendidikan vokasi dan kejuruan berwawasan *link and match*

Realisasi *link and match* berupa pengenalan pendidikan sistem ganda, pembentukan majelis kejuruan, penggalakan unit produksi, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, dan pengenalan *broad based curriculum*. Secara filosofis *link and match* mengandung makna wawasan pengembangan SDM, wawasan masa depan, wawasan mutu dan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah dan wawasan efisiensi. *Link and match* menyangkut proses interaktif dengan hasil yang sesuai (Wardiman 1998). Pendidikan vokasi dan kejuruan menganut prinsip berproses menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan masa depan. Dunia kerja lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan adalah dunia ekonomi yaitu dunia yang mengandung fenomena persaingan dan kerjasama, dunia yang cepat mengalami perubahan.

PENUTUP

Istilah pendidikan vokasi baru dikenal di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah disebut dengan pendidikan kejuruan dan diseleng-

garakan mulai tingkat SLTA dengan nama SMK. Pendidikan vokasi pada jenjang perguruan tinggi berbentuk Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Di dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruan, beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebagai berikut.

1. Kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan menjadi lebih baik bila ada dukungan dari beberapa pihak terutama institusi penyelenggara, kurikulum, pemerintah pusat / daerah, dunia usaha / industri, dan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan mendukung keberhasilan pendidikan vokasi dan kejuruan yang pada akhirnya dihasilkan tenaga kerja yang mempunyai *life skill* sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Keberhasilan pendidikan vokasi dan kejuruan akan meringankan beban ekonomi negara, sebaliknya kegagalan suatu pendidikan vokasi dan kejuruan berdampak menambah jumlah pengangguran yang akan memperberat ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzar. 2009. *Sekilas Mengenal Pendidikan Kejuruan*. (Diunduh tanggal 19-11-2009).
- Christyawan, Budi. 2009. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Diunduh tanggal 20-11-2009).
- Djojonegoro, Wardiman. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui SMK*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.
- Finlay, Niven & Young. 1998. *Changing Vocational Education and Training an International Comparative Perspective*. London : Routledge.

- Hartono, Joko. 2004. *Mengenal Pendidikan Vokasi*. Lampung Post. (Diunduh tanggal 20-11-2009).
- Jaya, Hedra. 2009. *Mendukung Pendidikan Vokasi Melalui SMK*. (Diunduh tanggal 19-11-2009).
- Juniadi, Wawan. 2009. *Kurikulum Berbasis Kompetensi - Versi KTSP*. (Diunduh tanggal 20-11-2009).
- Panji, Putu. 2009. *Pendidikan Vokasi suatu Pilihan*. (Diunduh tanggal 19-11-2009).
- Suparlan, Bawuk. 2008. *Pengaruh Pendidikan Sistem Ganda terhadap Daya Adaptif Kerja Siswa SMK*. (Diunduh tanggal 19-11-2009).